

Hajriyanto menjelaskan unsur demokratis diartikan, semua tahapan dan proses penyelenggaraan

terwujud.

"Kepanitiaannya Munaslub harus mencerminkan keuletan

lesaan konflik. Sebab nanya Munas yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah

uang untuk masalahnya. "Munaslub harus bertanggung dan tidak ada

REVISI UU KPK

Pengamat: Sikap Komisioner

Jakarta, Pelita

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Asyafiyah (UIA) Habbol Mawadi menilai sikap komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat berlebihan.

Padahal, kata Habbol kepada wartawan di Jakarta akhir pekan lalu poin-poin dalam draf revisi UU KPK justru memperkuat dan menegaskan apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ditegaskannya empat poin krusial dalam draf revisi UU KPK bukan poin yang akan melemahkan lembaga KPK. Tapi justru sebagai upaya mendorong KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

Dia mengingatkan KPK pernah beberapa kali kalah dalam menangani perkara di prapera. Karena itu, tentunya, kejadian tersebut menjadi suatu keharusan untuk merevisi UU KPK supaya KPK menjadi kuat dan UU KPK menjadi relevan untuk dipaparkan.

Terkait poin dewan pengawas KPK, kata Habbol, tidak perlu dikawatirkan akan membatasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Karena kinerja KPK tetap dilakukan berdasarkan prinsip kolektif kolegial.

Sementara Dewan Pengawas

hanya berfungsi sebagai supervisi atau dewan etik, yang diharapkan nantinya diisi oleh tokoh-tokoh negarawan, yang memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Orang-orang seperti itu cukup banyak di Indonesia dan saya yakin sangat pro terhadap pemberantasan korupsi di republik ini dan tidak akan membatasi. Kalau sudah sesuai dengan mekanisme, kenapa harus takut untuk diawasi, kan begitu," ujarnya.

Soal penyadapan yang akan diatur untuk dapat izin dulu dari dewan pengawas, pengajaran hukum di UIA Jakarta ini menegakkan sebagai sara-nak penting memburu para koruptor. Tapi penyadapan tetap harus dilakukan melalui prosedur dan mekanisme.

"Sehingga tidak sembarang orang yang akan disadap. Lagi pula selama ini, penyadapan kerap melebar dengan mengumbar pada persoalan-persoalan yang lain, seperti persoalan pribadi misalnya," tegas dia.

Habbol melihat dorongan revisi UU KPK sebenarnya lebih kepada upaya menguatkan kinerja KPK di hadapan publik.

Karena walau bagaimana pun, KPK bukanlah lembaga yang superbody, yang malah membuat para pemangku kebijakan menjadi takut luar biasa dalam menggalakkan program-programnya.

"Dengan nantinya revisi UU KPK disahkan oleh DPR dan pemerintah, justru semakin menunjukkan KPK bekerja den-

KPK Tolak Revisi Berlebihan

gan mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan UU KPK seperti menggulirkan bola panas. Publik akan banyak yang mem-

pertanggannya dan itu yang membuat DPR mendapat penilaian buruk dari masyarakat. "Namun, sejauh ini di kalangan anggota dewan masih meyakini langkah yang mereka lakukan adalah untuk memperkuat kinerja lembaga KPK," ujarnya. (kh)



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT ICTSI JASA PRIMA Tbk. ("Perseroan") MENGENAI RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS"), pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, dengan agenda sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan
- Ratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("POJK No.32"), maka panggilan untuk RUPS ("Panggilan Rapat") akan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, serta pada situs web Perseroan yaitu www.ijp.co.id.

Pinak yang berhak menghadiri RUPS adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016, atau kuasanya masing-masing yang diberikan kuasa khusus untuk menghadiri RUPS.

Setiap usulan tertulis yang membutuhkan keputusan RUPS dari 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK No.32 akan dimasukkan dalam agenda RUPS, dan usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikinya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 22 Februari 2016

DIREKSI PERSEROAN

SENIN | 22 FEBRUARI 2016/13 JUMADIL AWAL 1437 H

HARIAN PELITA 3

Harga rata-rata harian ke di Pasar Tradisional DI Tanggal : 19

No	Jenis Merek/ Komoditi	Satuan	Jakarta
1	BERAS	kg	11.30
	- IR I	kg	10.40
	- IR II	kg	10.40
	- IR III	kg	16.00
2	GULA PASIR	kg	13.20
	- Kelan Putih	kg	13.20
	- Lokal	kg	14.30
3	MINYAK GORENG	620 ml/btl	10.90
	- Bimoli Bolid	kg	11.00
	- Curah	kg	37.10
4	DAGING	kg	93.00
	- Sapi Murni	kg	23.00
	- Ayam Broiler	kg	51.00
	- Ayam Kampung	kg	397 gr/kg
5	TELUR AYAM	kg	43.20
	- Ras	kg	400 gr/dos
	- Ras	kg	11.25
6	SKM BENDERA	kg	1.100
7	SUSU BUBUK BENDERA	kg	5.200
8	JAGUNG PIPILAN	kg	8.500
9	GARAM BERYODIUM	kg	12.200
	- Bata	kg	14.500
	- Halus	kg	2.200
10	TEPUNG TERIGU	kg	37.200
	- Segitiga Biru	kg	37.200
11	KACANG KEDELAI	kg	66.400
	- Eks. Impor	kg	18.600
	- Lokal	kg	24.200
12	MIE INSTANT	kg	65.000
	- Indomie Kari Ayam	kg	21.000
13	CABE MERAH	kg	24.800
	- Keriting	kg	4.800
	- Biasa	kg	37.200
	- Rawit	kg	66.400
14	BAWANG MERAH	kg	13.800
15	BAWANG PUTIH	kg	23.200
16	IKAN ASIN TERI	kg	31.400
17	KACANG HIJAU	kg	18.800
18	KACANG TANAH	kg	24.200
19	KETELA POHON	kg	3.000

Sumber: Direktorat Bahan Pokok & Barang Strategis, Kementerian Perdagangan

Hig sink mtr yamaha F-3512-ND an ATA SUPRIATNA dia kp pager jang-kung rt 0206 kel situ ilir kec cibung-bulang kab bogor

Hig stnk mtr honda vario F-2305-FZ an ARDIYANSYAH dia kp karihkil rt 004001 kel karihkil kec aseeng kab. bogor

JL. A

T

SERVI

EMUASKA

9.400

11.000

13.800

8.400

95.000

31.000

66.000

20.800

35.200

9.500

38.800

4.800

2.410

4.000

7.600

7.080

8.380

1.900

30.600

23.800

61.600

13.800

23.200

31.400

18.800

24.200

3.000